

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjiP

KECAMATAN WLINGI

TAHUN 2025



KINERJA

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Wlingi tahun 2025. LKjIP Kecamatan Wlingi 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Kecamatan Wlingi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJiP Kecamatan Wlingi. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas yang diinginkan namun semoga laporan ini menjadi gambaran atas hasil kinerja kecamatan Wlingi di tahun 2025.

Demikian LKjIp ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.


CAMAT WLINGI
BESTA ALFINSIA RACHMAWAN, SH.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19790712 200312 1009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif ini menyajikan ringkasan capaian kinerja Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja (termasuk perubahan) dan hasil pengukuran kinerja akhir tahun. Penyajian difokuskan pada capaian sasaran strategis, indikator kinerja utama. Kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan ke depan sebagai dasar peningkatan kinerja berkelanjutan.

A. Ringkasan Capaian Kinerja : Sasaran, Indikator, Target, Realisasi, Persentase Realisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian Kinerja Kecamatan Wlingi Kabupaten Wlingi yang memuat rencana, capaian dan realisasi inikator kinerja dari sasaran strategis, dimana sasaran strategis tersebut termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Wlingi Kabupaten Tahun 2025-2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai Sakip pada tahun 2025 menargetkan dalam kinerja nilai 60. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Nomor R/900.15.03.03/727/409.9.4/2025 Tanggal 22 Agustus 2025 Nilai Sakip Kecamatan Wlingi adalah 58,30. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 mengalami penurunan atau tidak mencapai target yang ditentukan.

Sasaran strategis meningkatnya kemandirian desa di kecamatan dengan indikator Persentase Desa Mandiri Kecamatan Wlingi dapat direalisasi sebesar 100% dari target 80%, sehingga capaian kinerja adalah diatas 100% Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan Wlingi 2 tahun terakhir sudah mencapai target yang ditentukan. Seluruh Desa di wilayah Kecamatan Wlingi telah berstatus Desa Mandiri sesuai ketentuan Kementerian Desa. Capaian ini menunjukkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terintegrasi.

Sasaran strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator angka kriminalitas di kecamatan dapat direalisasi sebesar 14. Indikator angka kriminalitas merupakan indikator sasaran di awal tahun pada renstra tahun 2025-2029. Penurunan angka kriminalitas ini didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran pemerintah desa/kelurahan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

B. Ringkasan Kendala dan Langkah kedepan

Dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 masih ditemui beberapa kendala, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan Pegawai tentang SAKIP sehingga Pegawai kecamatan wlingi kurang terlibat dalam penyusunan SAKIP
2. Koordinasi Lintas Sektor dalam upaya penanganan Ketentraman dan Ketertiban umum belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan
3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat wilayah

Sebagai langkah ke depan, Kecamatan Wlingi akan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan memberikan pengetahuan tentang SAKIP di lingkup Kecamatan Wlingi
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor secara intensif dan berkelanjutan dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia , serta instansi vertikal melalui rapat koordinasi berkala dan tindak lanjut hasil rapat.
3. Memperkuat Akuntabilitas kinerja Kecamatan melalui Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan berkelanjutan pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR2

IKHTISAR EKSEKUTIF3

DAFTAR ISI.....5

BAB I6

PENDAHULUAN.....6

A. Penjelasan Umum Organisasi6

B Aspek Strategis Organisasi.....9

C Dasar Hukum15

D Sistematika.....16

BAB II18

PERENCANAAN KINERJA.....18

A Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....18

 A. Perencanaan Anggaran Tahun 202520

BAB III.....23

AKUNTABILITAS KINERJA23

A. PENGUKURAN KINERJA23

B Capaian Kinerja Organisasi23

 Kesimpulan Efisiensi.....29

B. Realisasi Anggaran.....43

BAB IV46

PENUTUP.....46

A Kesimpulan.....46

B Rencana Tindak Lanjut48

LAMPIRAN – LAMPIRAN50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Kewilayahan.

Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.

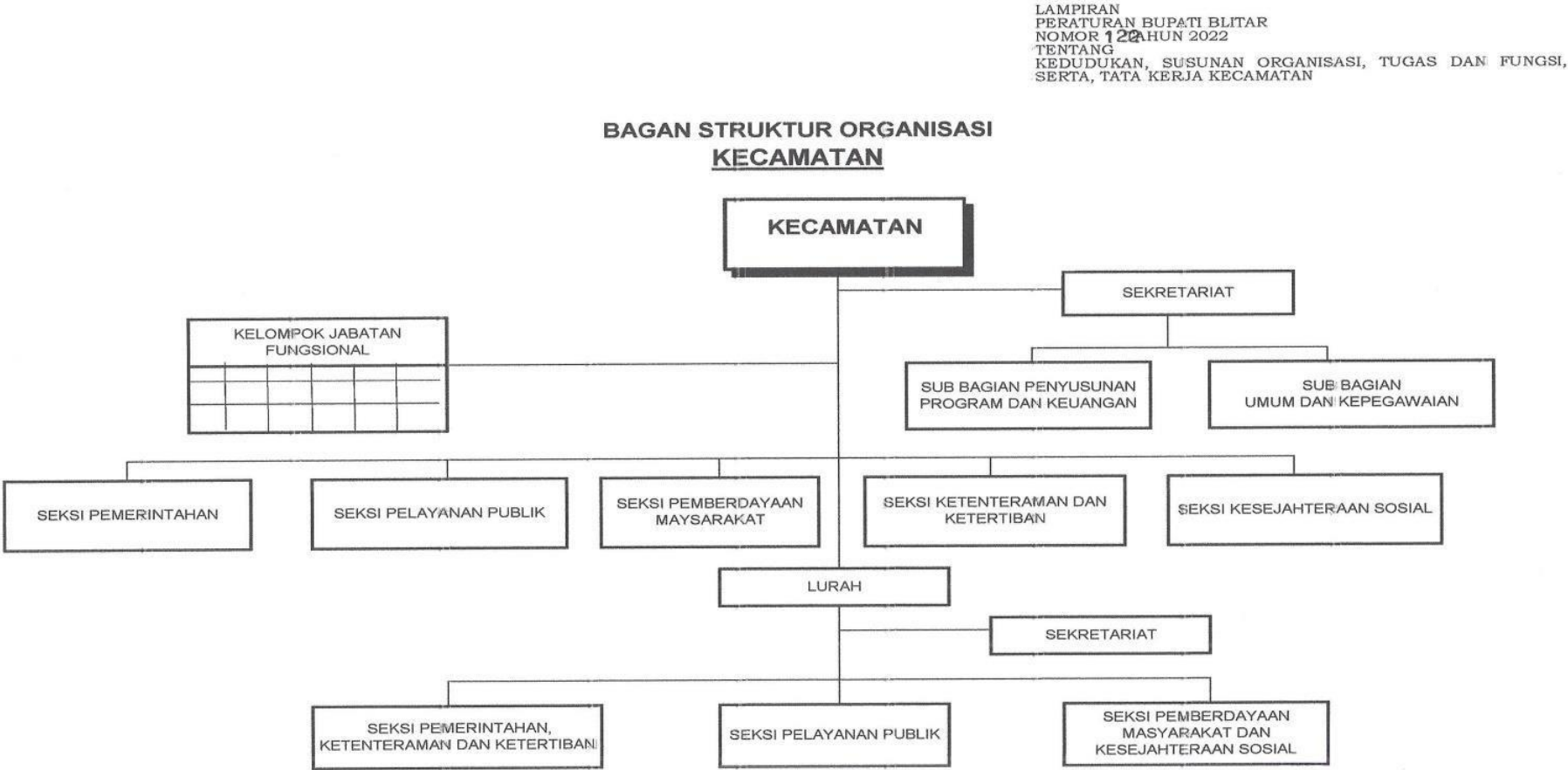
Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Penyelenggaraan pembinaan wilayah;
4. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Pelaksanaan pelayanan publik;

6. Penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dipimpin oleh Camat Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Wlingi



BUPATI BLITAR,
ttd
RINI SYARIFAH

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar memiliki ASN sebanyak 57 (lima puluh tujuh) Orang, terdiri dari 44 PNS dan 13 orang PPPK . ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Kecamatan dan Kelurahan Wlingi Kabupaten Blitar pada tahun 2025.

Tabel 1.1
Data ASN Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Camat	1 Orang
2	Administrator	1 Orang
3	Pengawas	33 Orang
4	Pelaksana	22 Orang
dst	Total	57 Orang

(Sumber data :Subbag Kepegawaian Kecamatan Wlingi 2025)

B Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan

5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada misi ke III “Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel bebas Korupsi Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan kebutuhan Masyarakat”, Sasaran ke 3 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Wlingi dapat diuraikan permasalahan pembangunan/issue strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana Strategis Kecamatan Wlingi tahun 2025-2029 yaitu.

Tabel 1.2
Isu Strategis Kecamatan Wlingi

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Menurunnya tingkat kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim	Masih tingginya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan masih tinggi	Perkembangan Teknologi Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini	Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan;	Pengentasan Kemiskinan
2.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Belum optimalnya pengelolaan sampah dan mitigasi bencana dan lingkungan hidup yang berkualitas	Pengelolaan sampah; Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah	Perubahan Iklim Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketangguhan Bencana,

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
3	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan predikat sangat inovatif	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraa n pelayanan publik berbasis digital	Perlunya peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Blitar Sulitnya masyarakat untuk menyampaika n aspirasi kepada Pemerintah daerah	Tata Kelola Keuangan Global Pergeseran Kebijakan Fiskal, CBD, dan Fintech	Tata Kelola pemerintaha n belum optimal terbatasnya sarana pemanfaata n teknologi informasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik dan bermanfaat dengan wawasan global dan tetap berkearifan lokal melalui kolaborasi governansi	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akselerasi Transformasi Digital Pelayanan Publik

(Sumber data :Renstra Kecamatan Wlingi 2025-2029)

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut di atas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 di atas, maka ditetapkan tujuan Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar adalah Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan, dan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 1.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Wlingi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks (Skala 0-100))
	a Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP
	b Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan
	c Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan

Sumber : (Renstra Kecamatan Wlingi 2025-2029)

Logical Framework keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut:

Gambar 1.2. Cascading Kecamatan Wlingi

KINERJA STRATEGIS	Tujuan RIMD	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi																				PK KEPALA DAUDRI									
	Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi																													
KINERJA STRATEGIS	Sasaran RIMD	Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pelayanan Publik																				PK CAMAT									
	Indikator sasaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																													
Kinerja Strategis Bidang Urusan	SASARAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD										Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan										Meningkatnya ketertarikan dan keterlibatan umum									
	INDUKTOR	SKOR SARIP										Persentase Desa Mandiri											Menurunnya Angka Kriminalitas di Kecamatan								
Kinerja Manajerial	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					Program Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan	Program Penyelesaian	PK ESELON II Sekretaris Rutin dan Kepala Seksi Non Rutin					
	Indikator Program	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)										persentase pelayanan kecamatan kelurahan dan kecamatan berkualitas baik (%)	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%)					Presentase Desa yang menetapkan APHDes Tepat Waktu					Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)								
													Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu (%)																		
													Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu (%)																		
Kinerja Manajerial	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		Administrasi i Kepegawain n Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat daerah				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Pemberdayaan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum		Koordinasi penyelenggaraan umum yang diselenggarakan	
	Indikator Kegiatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		Jumlah Laporan n Administrasi i Kepegawain n Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Laporan Pemberdayaan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum		Jumlah koordinasi pemerintahan umum yang diselenggarakan	
Kinerja Operasional	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bahasa Kinerja Perangkat Daerah	Penyenggrsaan an an Wali data Pendukung Statistik Sektor al Daerah	Penyediaan an Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan an Kantor	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyenggrsaan an an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Penataan, Pemandaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemandaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembiayaan Kerukunan Antar suku dan intra suku	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektor al Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan an Kantor	Tersedianya Peralatan rumah tangga	Tersedianya Bahan Logistik kantor	Tersedianya a Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya a Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan n Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan n Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan di bayarkan Pajaknya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemandaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikut Pembiayaan Kerukunan Antar Suku dan intra Suku		

C Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah:

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor

2/E);

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
- 19.** Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).

D Sistematika

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN

KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran BAB

IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025- 2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Sakip	80
		Predikat Nilai Sakip	BB
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	100%
3	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%
4	Menurunnya Jumlah Pelanggaran di Kecamatan	Indeks Kesalehan Sosial	89

(sumber data : Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan kec Wlingi)

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	60
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	80%
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas di Kecamatan	13

(sumber data : Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan kec Wlingi)

Perubahan perjanjian kinerja menyesuaikan dengan catatan hasil review atas rancangan akhir renstra kecamatan oleh Inspektorat dengan Bappedalitbang, diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas Kinerja: Indikator untuk sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD" direkomendasikan untuk diubah dari menjadi "Nilai SAKIP" dengan satuan "Nilai".
2. Merevisi penetapan indikator kinerja sasaran strategis “meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan Angka Kriminalitas di Kecamatan dengan satuan “Angka”.

A. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.082.650.920,- (Tiga milyar seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel 2.3

Tabel 2.3

Rincian Anggaran Pada Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.949.774.320,-
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.000.000,-
2	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	53.873.600,-
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.600.000,-

No	Sasaran	Program	Anggaran
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.575.000,-
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	46.828.000,-
	JUMLAH		2.082.650.920,-

c. Indikator Kinerja Utama Renstra 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU tahun 2025-2026 pada kecamatan Wlingi kabupaten Blitar dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Wlingi

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan melalui aplikasi e sukma Jatim	70	70	72	73	75	77	78	
2	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	Persentase	$=(\sum \text{Desa Mandiri})/(\sum \text{Desa di Kecamatan}) \times 100\%$ Website IDM / PMD	80%	80%	82%	85%	86%	87%	90%	
3	Angka Kriminalitas di Kecamatan	Angka	Angka kriminalitas $= (\sum \text{kriminalitas tahun } n / \sum \text{penduduk tahun } n) \times 100.000$ (Sumber : Polsek (diutamakan)/ BPS Kecamatan dalam angka (rilisnya tahun berikutnya	14	13	12	11	10	9	8	
4	Nilai SAKIP	Nilai	Penilaian Nilai SAKIP OPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar	60	60	61	62	63	65	66	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

B Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2025.

1. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP. Definisi operasional dari indikator Nilai SAKIP adalah penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat.

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD adalah sebesar 97% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP	60	58,30	97%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					97%

(Sumber data Kecamatan Wlingi Tahun 2025)

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, indikator Nilai SAKIP dapat direalisasi sebesar 58,30. Nilai SAKIP, merupakan nilai hasil evaluasi oleh Tim dari Inspektorat. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja nilai Sakip pada tahun 2025 menargetkan dalam kinerja nilai 60. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Nomor R/900.15.03.03/727/409.9.4/2025 Nilai Sakip Kecamatan Wlingi adalah 58,30.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Tahun 2024 Nilai SAKIP 60,35, Tahun 2023 Nilai SAKIP 65,41, Tahun 2022 Nilai SAKIP 63,88. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh kurangnya komitmen bersama pimpinan dalam implementasi SAKIP di Kecamatan Wlingi. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 – 2025.

Tabel 3.2

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	61	58,30	60,35	65,41

(Sumber Data Kecamatan Wlingi 2025)

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti belum tercapai 100% dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dengan target

Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.3

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	66	58,30	88 %

(Sumber Data: Kecamatan Wlingi 2025)

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kecamatan Tetangga (Kecamatan Wlingi dan Kecamatan Kesamben) maka capaian ini Lebih Rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya upaya yang dilakukan tidak dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada kecamatan tetangga.

Tabel 3.4

Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kec Tetangga (Wlingi)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	58,30	68,1

Sumber Data: Kecamatan Wlingi 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Menyusun dokumen dengan lebih teliti dan tepat waktu, serta membuat komitmen dan pemahaman yang sama terhadap sakip antara pimpinan dan staf.
2. Menerapkan implementasi SAKIP diawali dengan perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja secara berkala mulai dari pimpinan dan staf.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap sakip, sehingga membutuhkan persamaan persepsi dalam memahami sakip.
 2. Kurangnya komitmen perangkat daerah dalam implementasi sakip.
- Target kinerja dapat tercapai dipengaruhi fakto internal dan faktor eksternal. Faktor- faktor internal antara lain adalah :
- Dukungan dan komitmen pimpinan sangat penting untuk implementasi SAKIP.
 - Sistem informasi yang efektif dan efisien untuk mendukung pengumpulan data dan pelaporan.

Faktor- faktor eksternal yang mempengaruhi adalah

Adanya sumber daya eksternal dimana pihak pemeriksa yaitu Inspektorat, dan Bagian Organisasi sangat proaktif dan mendukung apabila kami membutuhkan informasi yang kami membutuhkan kejelasan.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kab kota	- Perencanaan, Penganggaran n , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan barang Milik daerah Penunjang urusan pemerinta h Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah. - Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Dokumen / Laporan perencanaan dan evaluasi Dokumen/ Laporan administrasi keuangan Dok/ Laporan Administras i Umum Mebel; kuris rapat 34, kursi kelurahan 30 Scanner 1, printer: 2 Laporan pembayaran listrik, surat menyurat dan gaji PPPK Paruh waktu. Pemeliharaa n kendaraan, peralatan dan mesin, gedung.	Dukungan da n komitmen pimpinan sangat penting untuk implementasi SAKIP. Sistem informasi yang efektif dan efisien untuk mendukung pengumpulan data dan pelaporan.

Sumber Data: Sub bagian SunGram dan keuangan Kecamatan Wlingi 2025

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/ Kota merupakan menggunakan nomenklatur sesuai dengan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. **6.465.926.068,01** dengan realisasi sebesar **6.068.440.999,00**

Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.6
 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran
 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.465.926.068,01	6.068.440.999,00	93,85%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.550.000,00	5.097.500,00	91,85%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.300.000,00	2.847.500,00	86,29%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.969.664.948,00	4.515.929.865,00	90,87%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.980.000,00	93.805.000,00	96,73%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.498.600,00	0,00	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.000.000,00	61.000.000,00	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.731.420,00	250.108.882,00	85%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.232.250,00	17.923.010,00	88,59%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.104.600,00	13.467.347,00	74,39%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.787.100,00	57.864.175,00	77,37%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46197470,01	30.941.850,00	66,98%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.410.000,00	129.912.500,00	95,94%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	295.371.000,00	253.280.013,00	85,75%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.214.050,00	832.932.839,00	96,38%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.075.500,00	2.060.000,00	99,25%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.506.800,00	60.013.322,00	87,60%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.200.000,00	21.100.000,00	77,57%
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	6.710.000,00	91,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	766.431.750,00	749.759.517,00	97,82%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.569.250,00	54.036.900,00	32,84%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	53.185.000,00	34.311.900,00	64,51%

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	46.880.000,00	30.804.000,00	65,71%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.384.250,00	19.725.000,00	17,71%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	91.580.000,00	0,00	0,00%
Total program	6.465.926.068,01	6.068.440.999,00	93,85%
Tingkat efisiensi			6,15

Sumber Data: Sub bagian SunGram dan keuangan Kecamatan Wlingi 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 88% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar **93,85%**. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Capaian realisasi kinerja dengan nilai efisiensi sebesar 6.15%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran
Penggunaan sumber daya anggaran sudah optimal sesuai output dan hasil yang dicapai. Pelaksanaan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota anggaran Rp. **6.465.926.068,01** realisasi Rp. **6.068.440.999,00 (93,85%))**. Terdapat penghematan 6.15% yang berasal dari Penghematan Materi rapat disediakan dalam bentuk file digital, mengurangi biaya cetak.
2. Efisiensi SDM
Adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan seksi seksi yang ada sehingga pendayagunaan SDM lebih optimal.
3. Efisiensi Waktu
Adanya penilaian mandiri LHE Akip, waktu evaluasi menjadi lebih cepat, karena pihak Inspektorat sudah bisa langsung mengakses link goggle drive yang tercantum dalam LHE Akip.

Kesimpulan Efisiensi

Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kab/ Kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran sebesar 6.15%

- Produktivitas SDM
- Proses evaluasi SAKIP oleh Inspektorat relatif lebih cepat.

Efisiensi ini memungkinkan cakupan asistensi diperluas tanpa penambahan biaya

2. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu Persentase Desa Mandiri di Kecamatan Definisi operasional dari indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan adalah rasio antara jumlah desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri berdasarkan skor IDM terhadap total jumlah desa di kecamatan, dikalikan 100%. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan Wlingi adalah sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa mandiri Kecamatan	80%	100%	125%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					125%

Sumber Data: Sub bagian SunGram dan keuangan Kecamatan Wlingi 2025

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, indikator Persentase Desa Mandiri Kecamatan dapat direalisasi sebesar 100% dari target 80%, sehingga capaian kinerja adalah 125%.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan Wlingi dari tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100 % karena dari 4 desa semua sudah memperoleh predikat desa mandiri:

Tabel 3.8

Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan

No .	Sasaran Strategis	Indikat or Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun n	Tahun n	Tahun n-1	Tahun n-2
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	80%	100%	100%	80%

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah mencapai diatas target dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.9

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	100%	100%	125%

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kecamatan Tetangga maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kecamatan Tetangga.

Tabel 3.10

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kecamatan Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kecamatan Tetangga (Wlingi)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di kecamatan	100%	100%

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Monitoring, Evaluasi dan Pendampingan secara berkala.
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara perangkat desa, pihak kecamatan dan Dinas PMD.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan

hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap ketentuan dan peraturan dalam penyusunan perencanaan yang seringkali terjadi perubahan.
2. Kurangnya koordinasi dengan kecamatan terkait

Kinerja tahun 2025 dapat tercapai juga dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor- faktor internal tersebut antara lain :

1. Optimalnya SDM, walaupun SDM terbatas tetapi pelaksanaan kegiatan tetap optimal.
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintahan desa, kecamatan dan Dinas PMD.

Sedangkan faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi adalah regulasi dan dukungan pemerintah terhadap pembangunan desa.

Analisis penyebab keberhasilan pada sasaran Meningkatkan kemandirian Desa di Kecamatan adalah:

1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintahan desa, kecamatan dan Dinas PMD.

Pada sasaran Meningkatkan kemandirian Desa di Kecamatan kegiatan yang sudah dibuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka mendukung capaian kinerja adalah kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa melalui Musrenabng Tingkat Kecamatan.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran Meningkatkan kemandirian Desa di Kecamatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan
---------	---------	----------	--------	-------------------------------

Meningkatnya kemandirian Desa di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peran aktif masyarakat desa
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peran aktif masyarakat kelurahan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi dan sinergi TP PKK se Kecamatan Wlingi
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa.	Koordinasi yang baik antara pemerintahan desa, kecamatan, dan dinas PMD

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Program dan kegiatan menggunakan nomenklatur sesuai dengan yang diperjanjikan.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kemandirian desa di kecamatan adalah sebesar

Rp. 4.223.833.980,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.160.291.380,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian desa di kecamatan.

Tabel 3.12

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran kemandirian desa di kecamatan

NO	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja		%
		Operasi		
		Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	7
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.223.833.980,00	4.160.291.380,00	98,5%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.398.600,00	15.216.000,00	74,6%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.898.600,00	10.716.000,00	67,4%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,0%
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	20.900.000,00	12.540.000,00	60,0%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20.900.000,00	12.540.000,00	60,0%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.182.535.380,00	4.132.535.380,00	98,8%
	Kelurahan Wlingi	831.100.720,00	823.238.653,00	98,5%
	Kelurahan Babadan	840.475.720,00	827.606.587,00	99,3%
	Kelurahan Beru	845.875.720,00	839.814.344,00	99,0%
	Kelurahan Tangkil	838.794.000,00	830.663.049,00	91,3%
	Kelurahan Klemunan	826.289.220,00	754.489.384,00	97,4%
	Tingkat Efisiensi			2,6%

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kemandirian desa di kecamatan Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 98%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kemandirian desa di kecamatan dengan nilai efisiensi sebesar 2,63%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Dari total anggaran Rp. 4.160.291.380,00, realisasi Rp. 4.223.833.980,00 menunjukkan hemat anggaran sebesar 2,63% berasal dari:

- Beberapa kegiatan pada PKK tidak terserap dan kegiatan di kelurahan tidak terserap.

2. Efisiensi SDM

SDM menjadi lebih efisien karena monitoring dan evaluasi ke desa kelurahan dibagi ke dalam beberapa tim dengan jangkauan yang lebih luas.

3. Efisiensi Waktu

Waktu menjadi lebih efisien karena setiap kegiatan direncanakan dengan baik dan fokus pada tugas masing- masing.

Kesimpulan efisiensi:

- Penghematan anggaran hanya 2,63%.
- SDM menjadi lebih efisien karena monitoring dan evaluasi ke desa kelurahan dibagi ke dalam beberapa tim dengan jangkauan yang lebih luas.
- Waktu menjadi lebih efisien karena setiap kegiatan direncanakan dengan baik dan fokus pada tugas masing- masing.

1. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu angka kriminalitas di kecamatan. Definisi operasional dari indikator angka kriminalitas di kecamatan adalah Jumlah kasus kriminal yang dilaporkan dan tercatat di kepolisian kecamatan selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk kecamatan dikalikan 100.000.

$$= \frac{(\sum \text{kriminalitas tahun } n)}{(\sum \text{penduduk tahun } n)} \times 100.000$$

*Sumber : Polsek ($\sum$ kriminalitas) /
BPS Kecamatan dalam angka (rilisnya tahun berikutnya))

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum adalah sebesar 12 sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.13

Realisasi Kinerja Sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	angka kriminalitas di kecamatan	13	12	92%

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, indikator angka kriminalitas di kecamatan dapat direalisasi sebesar 12. Indikator angka kriminalitas di kecamatan merupakan indikator negatif jadi semakin sedikit angka maka semakin bagus.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum tidak mengalami kenaikan atau sama seperti tahun 2024 sebesar 14. Kejadian tersebut merupakan kasus pencurian dan penipuan. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh faktor tingginya angka pengangguran. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023- 2025

Tabel 3.14

Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

No.	Sasaran Strategis	Indikat or Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun n	Tahun n	Tahun n-1	Tahun n-2
1	meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	angka kriminalitas di kecamatan	13	12	14	14

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 92% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2030. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.15

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	angka kriminalitas di kecamatan	8	12	92 %

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kecamatan Tetangga maka capaian ini lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kecamatan.

Tabel 3.16

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Kecamatan Tetangga (Wlingi)
1	meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	angka kriminalitas di kecamatan	12	23,95

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti belum tercapai target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025.

Ada beberapa faktor pendukung antara lain :

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor yang Lebih Efektif :
 - a) Terjalinnya koordinasi rutin dan responsif antara Kecamatan Wlingi dengan Polsek Wlingi, Koramil Wlingi, Satpol PP Kabupaten Blitar, dan perangkat desa/kelurahan;
 - b) Adanya pola komunikasi cepat (grup koordinasi, laporan informal, dan rapat insidentil) sehingga gangguan trantibum dapat segera ditindaklanjuti;
 - c) Pelaksanaan rapat koordinasi kewilayahan secara berkala sebagai forum pemetaan potensi gangguan;
 - d) Dampak : gangguan dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
2. Peran Aktif Pemerintah Desa/Kelurahan dan Unsur

Kewilayahan :

- a) Kepala Desa/Lurah, BPD/LPMK, Linmas, dan tokoh masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pencegahan dan penanganan gangguan trantibum;
- b) Optimalisasi peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam deteksi dini dan penyelesaian masalah di tingkat desa/kelurahan;
- c) Penyelesaian masalah banyak dilakukan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah di tingkat desa/kelurahan;
- d) Dampak : beban penanganan di kecamatan dan polsek berkurang dan tingkat penyelesaian meningkat.

3. Standarisasi Mekanisme Penanganan Gangguan Trantibum :

- a) Tersedianya alur pelaporan dan penanganan gangguan trantibum yang jelas, mulai dari desa/kelurahan hingga kecamatan;
- b) Adanya pencatatan dan dokumentasi kejadian yang lebih tertib sebagai bahan evaluasi kinerja;
- c) Penggunaan indikator yang terukur : jumlah kasus kriminalitas ditahun berjalan dibanding total jumlah penduduk pada suatu wilayah;
- d) Dampak : capaian indikator lebih terukur dan akuntabel.

4. Pengalaman dan Pembelajaran dari Renstra Sebelumnya (2021–2026)

- a) Pengalaman pelaksanaan program trantibum pada periode Renstra sebelumnya menjadi modal awal dalam periode Renstra 2025–2029, walaupun indikator kinerjanya berubah;
- b) Kecamatan telah memiliki pola kerja yang matang, sehingga pada tahun 2025 mampu langsung mencapai target tinggi;
- c) Adanya kesinambungan kebijakan meskipun terjadi perubahan dokumen perencanaan;
- d) Dampak: capaian awal Renstra baru dapat langsung optimal.

5. Dukungan Kebijakan dan Program dari Pemerintah

Kabupaten Blitar :

- a) Dukungan operasional dan pembinaan dari Satpol PP Kabupaten, Kasi Trantib Kecamatan Wlingi dan Polres Blitar serta Polsek Wlingi;
 - b) Sinkronisasi kebijakan trantibum kabupaten dengan pelaksanaan di kecamatan;
 - c) Adanya kegiatan fasilitasi, pembinaan Linmas, dan penegakan Perda yang mendukung stabilitas wilayah.
 - d) Dampak : Kecamatan Wlingi tidak bekerja sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem kewilayahan Kabupaten Blitar.
6. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
- a) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum;
 - b) Partisipasi masyarakat dalam melaporkan potensi gangguan sejak dini;
 - c) Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meredam konflik sosial;
 - d) Dampak : jumlah gangguan yang berkembang menjadi kasus besar semakin menurun.
7. Penyesuaian Target yang Lebih Realistis dan Fokus pada Kualitas Penyelesaian
- a) Target 95% pada PK 2025 merupakan target yang realistis dan berbasis kondisi riil lapangan. Target pada PK Perubahan 2025 adalah 65,85 dan realisasinya sebesar 23,95 dengan sifat indikator kinerja negatif (menurun);
 - b) Fokus tidak hanya pada jumlah kejadian, tetapi pada tingkat penyelesaian secara tuntas;
 - c) Indikator tetap sejalan secara substansi dengan Renstra meskipun terdapat penyesuaian periode;
 - d) Dampak : capaian kinerja dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan secara SAKIP.

Tercapainya target persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebesar 95% (berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025) pada tahun 2025 dan 23,95 (berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025) didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektor, peran aktif pemerintah desa/kelurahan dan unsur kewilayahan, mekanisme penanganan gangguan yang lebih

terstruktur, serta dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu, pengalaman pelaksanaan Renstra sebelumnya dan meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang memungkinkan capaian awal Renstra 2025–2029 telah memenuhi target yang ditetapkan.

1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, Koramil dan Polsek Wilayah Wlingi.
2. Mengoptimalkan komunikasi yang cepat melalui grup- grup Whatsapp.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut.

1. Mengagendakan secara rutin koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, Koramil dan Polsek Wilayah Wlingi.
2. Meningkatkan komunikasi yang cepat melalui grup- grup Whatsapp.

Target kinerja tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan elemen – elemen yang ada di wilayah seperti kondisi sosial ekonomi, kemiskinan dan tingkat pendidikan. Sedangkan faktor eksternal merupakan elemen yang berasal dari luar wilayah Kecamatan Wlingi seperti pengaruh media sosial dan teknologi digital, serta pengaruh adanya kerusuhan massal pada bulan Agustus 2025. Analisa penyebab kegagalan:

- Pengaruh faktor eksternal yang tidak terkendali, dimana pada bulan Agustus 2025 terjadi kerusuhan massal secara nasional.

Dalam menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.17

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan/Kegagalan dalam Sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Kegagalan Pencapaian
meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya penyelenggaraa n Ktenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya penyelenggaraa n Ktenteraman dan Ketertiban Umum	Pengaruh faktor eksternal yang tidak terkendali, dimana pada bulan Agustus 2025 terjadi kerusuhan massal secara nasional
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum	

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Program dan kegiatan menggunakan nomenklatur sesuai dengan yang diperjanjikan Analisis: Kegiatan Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kegiatan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum masih sepenuhnya mendukung menurunkan indikator angka kriminalitas di Kecamatan.

Tabel 3.18

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja		%
		Operasi		
		Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	7
1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.550.000,00	8.325.000,00	97,37%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.750.000,00	6.525.000,00	96,67%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%
	Harmonisasi Hubungan dengan	2.250.000,00	2.025.000,00	90,00%

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja		%
		Operasi		
		Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	7
	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.828.000,00	45.253.000,00	96,64%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	46.828.000,00	45.253.000,00	96,64%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.528.000,00	39.178.000,00	96,67%
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3.600.000,00	3.375.000,00	93,75%

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja		%
		Operasi		
		Anggaran	Realisasi	
	2	3	4	7
	realisasi anggaran	55.378.000,00	53.578.000,00	96,75%
	efektifitas anggaran			6,25%

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 92% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 96,75%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan nilai efisiensi sebesar 6,25%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran
- Dari anggaran Rp. 55.378.000,00 realisasi Rp. 53.578.000,00 atau 96,75%, menunjukkan hemat 6,25% yang berasal dari materi rapat disediakan dalam bentuk file digital.
2. Efisiensi SDM
- Kolaborasi bersama Polsek dan Koramil Kecamatan Wlingi dapat meningkatkan efisiensi SDM.
3. Efisiensi Waktu
- Kolaborasi bersama Polsek dan Koramil Kecamatan Wlingi dapat meningkatkan efisiensi waktu.
- Kesimpulan efisiensi :
- Efisiensi anggaran sebesar 6,25%..

- Kolaborasi bersama Polsek dan Koramil Kecamatan Wlingi dapat meningkatkan efisiensi SDM dan waktu.

B. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.19
Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Program	Anggaran		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.223.833.980	4.160.291.380	98,5%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.800.000	9.810.000	100 %
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.550.000	8.325.000	97 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	46.828.000	45.253.000	97 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.935.839.268	6.068.440.999	87,47 %
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.000.000	9.000.000	100 %

Sumber Data: Sub bagian Sun Gam dan Keuangan Kecamatan Wlingi

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran tahun 2025 di Kecamatan Wlingi, berikut adalah analisis mengenai permasalahan, kendala, serta langkah strategis yang diambil untuk mengatasinya.

- 1) Analisis Permasalahan dan Kendala Keuangan
- Meskipun capaian kinerja fisik rata- rata mencapai 100%, tetapi terdapat selisih anggaran Beberapa kendala yang diidentifikasi meliputi:
- a) Optimalisasi Belanja Operasional : Penghematan pada pos belanja rutin seperti alat tulis kantor (ATK), listrik, dan pemeliharaan rutin yang ternyata dapat ditekan melalui pengawasan yang lebih ketat.

b) Kendala Administratif Verifikasi : Adanya ketelitian tinggi dalam

verifikasi dokumen SPJ seringkali membuat proses pencairan anggaran membutuhkan waktu lebih lama untuk memastikan kepatuhan regulasi.

- c) Faktor Eksternal Penunjang : Ketergantungan pada pihak ketiga dalam penyediaan jasa internet atau kebersihan yang sewaktu-waktu dapat mengalami kendala teknis di luar kendali internal kecamatan.

2) Langkah-Langkah Mengatasi Kendala

Untuk memastikan kendala tersebut tidak menghambat pelayanan publik dan justru menjadi poin efisiensi, Kecamatan Wlingi melakukan langkah-langkah berikut :

- a) Penguatan Koordinasi Perencanaan (Cascading) : Melakukan koordinasi intensif sejak penyusunan dokumen agar target kinerja selaras dengan alokasi anggaran, sehingga meminimalkan potensi anggaran yang tidak terserap secara sia-sia;
- b) Sistem Penatausahaan Disiplin : Menerapkan verifikasi dokumen SPJ yang ketat namun sistematis untuk menjamin akuntabilitas tanpa menghambat aliran kas organisasi.
- c) Manajemen Pemeliharaan Preventif : Melaksanakan jadwal pemeliharaan aset secara rutin guna mencegah kerusakan berat yang membutuhkan biaya perbaikan besar di masa depan;
- d) Analisis Kebutuhan Riil : Melakukan pengadaan barang berdasarkan analisis kebutuhan nyata kantor, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan berkontribusi langsung pada produktivitas pegawai;
- e) Sinkronisasi Pelayanan Publik: Mengefektifkan koordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan kebijakan yang dilimpahkan Bupati berjalan efektif meski terdapat efisiensi anggaran.

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 pada Kecamatan Wlingi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2**Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya kemandirian Desa di Kecamatan	Persentase desa Mandiri di Kecamatan	92%	92%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka Kriminalitas Di Kecamatan	187,9%	187,9 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	97%	97%	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja PD				125,63 %	Sangat Tinggi

B Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Ditemukan bahwa kinerja Angka Kriminalitas Di Kecamatan tercapai melebihi target yang ada, sehingga perlu adanya pembahasan kenapa bisa melebihi target. Hal ini antara lain dikarenakan perbedaaan definisi operasional antara Perjanjian Kinerja 2025 dan Renstra 2021-2026 dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dan Renstra 2025-2029.

Tahun 2025 ini adalah masa transisi kepemimpinan dari Bupati Blitar yang lama ke Bupati Blitar yang baru dilantik. Hal ini juga ikut berdampak pada laporan capaian kinerja pada keseluruhan Perangkat Daerah yang ada.

Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja dan kendala/permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4.3
Rencana Tindak Lanjut

No	Sasaran Kinerja	Permasalahan / Isu Strategis	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kemandirian Desa di Kecamatan	Capaian desa mandiri telah tercapai 92%, perlu dijaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas kemandirian desa	a) Melakukan pembinaan dan monitoring berkala terhadap pemerintahan desa- Mendorong pengembangan potensi ekonomi dan inovasi desa b) Memfasilitasi replikasi praktik baik desa mandiri	Camat, Seksi PM, Seksi Pemerintah
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian melebihi target (187,9%) sehingga perlu pengendalian dan penajaman indikator kinerja	a) Memperkuat koordinasi dengan TNI/Polri, Satpol PP, dan unsur masyarakat b) Mengoptimalkan upaya pencegahan gangguan gangguan trantibum	Camat, Seksi Trantib, Forkopimcam
			c) Melakukan evaluasi indikator kinerja agar lebih proporsional	

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Akuntabilitas kinerja telah tercapai optimal, perlu peningkatan kualitas dan keberlanjutan implementasi SAKIP	a) Mempertahankan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja b) Meningkatkan kualitas indikator berbasis outcome c) Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala	Camat, Subbag Penyusunan Perencanaan & Keuangan
---	---	---	---	---

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a) **Pohon Kinerja**
- b) **Indikator Kinerja Utama**
- c) **Perjanjian Kinerja**
- d) **Rencana Aksi Perangkat Daerah**

